

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad. (2000). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Achmad Ali. (2009). *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Teori Keadilan (judicial prudence) termasuk interpretasi Undang-Undang (legis prudence)*. Jakarta, Kencana Penada Media Group: Vol-1.
- Ahmad Yani dan Gunawan. (2004). *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*. Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Amiruddin dan Zainuddin. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, Raja Grafindo Nusantara.
- Asra (2015). *Kepailitan Korporasi Corporate Rescue: Key Concept Dalam Kepailitan Korporasi*. Jakarta, Diadit Media.
- Artomo Rooseno. (2008). *Akibat Hukum Putusan Pernyataan Pailit Bagi Debitor Terhadap Kreditor Pemegang Hak Tanggungan*. Tesis Magister Kenotariatan Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Bagir Manan. (2001). *Mengenal PERPU Kepailitan dalam Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung, Alumni.
- Bernard Nainggolan. (2011). *Perlindungan Hukum Seimbang Debitor, Kreditor dan Pihak-Pihak Berkepentingan Dalam Kepailitan*. Jakarta, Alumni,
- .(2014). *Peranan Kurator dalam Pembersihan Boedel Pailit*. Bandung, Alumni.
- Carl Joachim Friedrich. (2004). *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung, Nuansa dan Nusamedia
- Charles Himawan dalam Sunarmi. (2006). *Menuju Hukum Kepailitan yang Melindungi Kepentingan Debitor dan Kreditor. Masalah-masalah Hukum ekonomi kontemporer*. Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi.
- Edward A. Haman. (2006). *The Complete Personal Bankruptcy Guide*. Illinios, Sphinx Publishing.
- Gustav Radbruch Terjemahan Shidarta. (2012). *Tujuan Hukum*. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- H.M.N. Purwosutjipto. (1992). *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid 8, Perwasitan, Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*. Jakarta, Djambatan: Cet.3.
- Imran Nating. (2005). *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada: Edisi Revisi.
- Jerry Hoff. (2000). *Undang-Undang Kepailitan Indonesia*. Jakarta, Tatanusa.

- Johny Ibrahim. (2007). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang, Banyu Media Publishing.
- Juanda H.E. (2016). *Kekuatan Alat Bukti dalam Perkara Perdata menurut Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi.
- Kartini Muljadi. (2001). *Pengertian dan Prinsip-prinsip Umum Hukum Kepailitan, dalam Rudhy A. Lontoh et.al., ed., Penyelesaian Utang-piutang; Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung, Alumni.
- L.J Van Apeldoorn dalam Shidarta. (2006). *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*. Bandung, PT. Revika Aditama.
- Lilik Mulyadi. (1999). *Hukum Acara Perdata : Menurut Teori dan Praktek Peradilan di Indonesia*. Jakarta, Djambatan.
- M. Hadi Shubhan. (2008). *Hukum Kepailitan, Prinsip Norma, dan Praktik di Pengadilan*. Jakarta, Kencana Pranada Media Group
- Marianna Sutadi. (2001). *Hukum Acara Pada Pengadilan Niaga, dalam Rudhi A. Lontoh, Penyelesaian Utang Piutang*. Bandung, Alumni.
- Mochtar Kusumatmadja dan Arief Sidharta. (2000), *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. Bandung, Alumni.
- Munir Fuady (2005). *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*. Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Notohamidjojo. O. (2011). *Soal-soal Pokok Filsafat Hukum*. Salatiga, Penerbit Griya Media.
- Peter Mahmud Marzuki. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta, Kencana.
- Peter Mahmud dan Rahayu Hartini. (2007). *Hukum Kepailitan*. Malang, Universitas Muhammadiyah Malang: Ed. Revisi, Cet. 2.
- Putriyanti dan Wijayanta. (2010). *Kajian Hukum Tentang Penerapan Pembuktian Sederhana dalam Kepailitan Asuransi*, Mimbar Hukum.
- Rachmadi Usman. (2006). *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Rahayu Hartini. (2007). *Hukum Kepailitan*. Malang, Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang: Ed. Revisi, Cet. 2.
- Rudhi Prasetya. (2001). *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*. Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Rudhy A. Lontoh. (2001). *Penyelesaian Utang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung, Alumni.
- Satjipto Rahardjo. (2006). *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta, UKI Press.
- Shidarta. (2006). *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*. Bandung, Refika Aditama.
- Siti Anisah. (2008). *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Yogyakarta, Total Media: Cetakan Kedua
- Soerjono Soekanto. (2012). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta, Rajawali: Cet-12.

- Sudikno Mertokusumo. (2002). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta, Liberty.
- Sudikno Mertokusumo dan Pitio. (1993), *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*. Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Sunarmi. (2010), *Hukum Kepailitan Edisi 2*. Jakarta, PT. Soft Media
- Sutan Remy Sjahdeini. (2010). *Hukum Kepailitan memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*. Jakarta, Pustaka Utama Grafiti
- Theo Huijber. (1995). *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta, Kanisius: Cet. VIII
- Victorianus M. H. Randa Puang. (2011). *Penerapan Asas Pembuktian Sederhana "dalam Penjatuhan Putusan Pailit"*. Bandung, PT. Sarana Tutorial Nurani Sejahtera.
- Viktor Situmeang dan Hendri Soekarno. (1994). *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*. Rineke Cipta. Jakarta.

Perundang-undangan dan Peraturan Lainnya

- Herzien Inlandch Reglement (HIR).
- Rechtreglement Voor de Buitengewesten (RBG).
- Wetboek op de Burgelijke Rechtsvordering (RV).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Perkara Nomor: 769/XII/ARB-BANI/2015 tanggal 29 Juni 2016.
- Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 55/PDT.SUS-PAILIT/2017/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 9 November 2017.
- Penetapan Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Tangerang Nomor: 55/PEN.EKS/2016/PN.TNG Jo.No.769/XII/ARB-BANI/2015 tanggal 04 Desember 2017.

Sumber Lainnya

- Insert Poin Online*, diakses dari <https://insertpoin.blogspot.com/> , diakses pada 18 Januari 2022 Pukul 10.33 WIB
- Maliki (2009, Juni). *Hukum Pembuktian Sederhana Dalam Kepailitan PT*. *Dirgantara Indonesia (Persero)* <http://eprints.umm.ac.id/8133/>, diakses pada 06 Mei 2021
- Zulaeha. (2015 Desember). *Mengevaluasi Pembuktian Sederhana dalam Kepailitan sebagai Perlindungan terhadap Dunia Usaha di Indonesia*. <http://www.jhaper.org/index.php/JHAPER/article/view/18/24>, diakses pada 06 Mei 2021.
- https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEWji673X45P5AhW_3HMBHVpPCE8QFnoECAcQAQ&url=https%3A%2F%2Fdigilib.uns.ac.id%2Fdokumen%2Fdownload%2F486491

[%2FNDg2NDkx&usg=AOvVaw0ZLmnyYRsu9ZYJweLzQbvU](#) , diakses pada 12 Januari 2022, Pukul 12.03 WIB

Christopher Panal Lumban Gaol. (2018, Juli). *Posisi BI Checking untuk Pembuktian Sederhana dalam Perkara Kepailitan dengan Bank Sebagai Kreditur*. <http://repository.unpar.ac.id/handle/123456789/8666?show=full>, diakses pada 06 Mei 2021.

